LAPORAN TUGAS AKHIR

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Aswawi Hariangga
NIM : 126232060

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANEGARA JAKARAT

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Aswawi Hariangga
NIM : 126232060

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT

UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

PROFESI AKUNTAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANEGARA JAKARAT

2024

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Muhammad Aswawi Hariangga
126232060

Disetujui Oleh:

Pembimbing

SUSANTO SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA

Abstrak

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dengan pendekatan *cross section*. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Indonesia. Waktu penelitian yakni tahun anggaran 2023. Dengan 221 pemerintah daerah di wilayah timur yang menjadi populasi penelitian. Mekanisme penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga diperoleh obyek penelitian sebanyak 98 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Kinerja keuangan pemerintahan daerah di Indonesia tidak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran suatu pemerintah daerah dengan nilai Sig. Sebesar 0,056 >0,05 dan nilai thitung 1,933 > ttabel 1,667 sehingga H1 ditolak, 2) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan atas hasil audit terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan nilai Sig. Sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai thitung 3,149 > ttabel 1,667 sehingga H2 diterima, 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada hasil tindak lanjut atas temuan audit mengenai kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dengan nilai Sig. sebesar. 0,004 < 0,005 dan nilai thitung 2,081 > 1,668 sehingga H3 diterima.

Kata Kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

The aim of this study is to identify and test the variables that may influence the financial performance of local governments in Indonesia. This research employs hypothesis testing with a cross-sectional approach. The study was conducted on local governments in Indonesia during the 2023 fiscal year, with 221 local governments in the eastern region as the research population. The sample selection was carried out using purposive sampling, a technique that selects samples based on criteria determined by the researchers, resulting in a total of 98 provincial, regency, and city governments as research subjects.

The study results indicate that: 1)The financial performance of local governments in Indonesia is not positively and significantly influenced by the size of a local government, with a significance value of 0.056 > 0.05 and a t-value of 1.933 > t-table 1.667, thus rejecting H1, 2) There is a negative and significant influence of audit results on the financial performance of local governments in Indonesia, with a significance value of 0.002 < 0.05 and a t-value of 3.149 > t-table 1.667, thus accepting H2, 3) There is a positive and significant influence of follow-up actions on audit findings concerning the financial performance of provincial governments in Indonesia, with a significance value of 0.004 < 0.005 and a t-value of 2.081 > t-table 1.668, thus accepting H3.

Keyword: Local Government Size, Audit Findings, Audit Recommendations Follow-up, Financial Performance of Local Governments

Kata Pengantar

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT dan berkat karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana akuntan, dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanegara.

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga seluruh masalah yang ada pada saat menyusun karya akhir ini dapat teratasi. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jamaluddin Iskak, CA., CPA selaku Kepala Ketua Program Studi PPAk.
2. Bapak SUSANTO SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA selaku dosen pembimbing akademis yang telah menyediakan waktunya serta tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun tugas akhir
3. Seluruh dosen PPAk untar yang telah memberikan saya cukup banyak ilmu dan dan nasihat selama proses pembelajaran Program Pendidikan Profesi Akuntansi
4. Orang tua yang telah memberikan saya semangat, kasih sayang serta kepedulian dalam menjalani perkuliahaan ini
5. Kerabat teman-teman kerja di BPK yang telah menyemangati saya dan terus membantuk saya apabila saya dalam kesulitan pada proses perkuliahaan
6. Sahabat dan teman-teman PPAk Batch 18, yang telah berjuang bersama-sama, memberikan bantuan secara moril maupun moral, semangat, dan dukungan serta pengalaman dan waktu yang banyak yang luar biasa selama perkuliahaan

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas akhir ini masih terdapat kekurangan/kelemahan karena ada keterbatasan kemamapuan dan pengetahuan yang penulis miliki walaupun penulis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami serta

bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi para pembaca serta pihak-pihak lain yang berkepentingan

Jakarta, 30 November 2024

Muhammad Aswawi Hariangga

Daftar Isi

Kata Pengantar 5
Daftar Isi 7
Daftar Tabel 9
Daftar Gambar 10
BAB I 11
PENDAHULUAN 11
1.1 Latar Belakang 11
1.2 Identifikasi Masalah 13
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Manfaat Penelitian 13
BAB II 15
LANDASAN TEORI 15
2.1 Teori Agensi 15
2.2 Manfaat Pemeriksaan 15
BAB III 17
METODE PENELITIAN 17
3.1 Sumber dan Jenis Data 17
3.2 Teknik Pengambilan Data 17
3.3 Kerangka Konseptual Penelitian 17
3.4 Metode analisis data 18
BAB IV 19
HASIL DAN PEMBAHASAN 19
4.1. Hasil Penelitian 19
4.1.1 Uji Normalitas dan Statistik Deskriptif 19
4.1.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 20
4.1.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 21
4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 21
4.1.5 Uji Hipotesis 22
4.2 Pembahasan 22
4.2.1 Pengaruh Besar Kecilnya Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangannya 22
4.2.2 Pengaruh Banyaknya Temuan Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemda 23

4.2.3 Pengaruh Dampak Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemda 23
BAB V 25
KESIMPULAN DAN SARAN 25
5.1 Kesimpulan 25
5.2 Saran 25
DAFTAR PUSTAKA 27

Daftar Tabel

Tabel 1 Proses Pemilihan Sampel.....17
Tabel 2 Statistik Deskriptif.....19
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas.....20
Tabel 4 Hasil Uji Signifikansi Parsial 21
Tabel 5 Hasil Uji Signifikansi Simultan 21
Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....21

Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Konseptual 18
Gambar 2 Hasil Uji Normalitas.....20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah satu dari sekian pemerintah yang menganut sistem otonomi daerah, di mana negara memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah (pemda) untuk mengurus keuangan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerahnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang kepada para kepala daerah untuk mewujudkan otonomi daerah. Otonomi daerah mengandung makna bahwa kewenangan yang paling besar untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah diberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan satu kesatuan dalam bagian siklus dalam mengelola keuangan daerah. Pada konteks ini, tata kelola keuangan yang efektif melibatkan pendekatan bertahap untuk memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kepentingan negara dan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 3 meliputi asas umum dan susunan APBD, wewenang tata kelola keuangan daerah, perumusan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan dan pergeseran APBD, pengawasan serta pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, dan lain-lain. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu untuk menerapkan tata kelola yang baik yang nantinya akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sularso dan Restianto (2011) memaparkan bahwa kemajuan yang diperoleh dari suatu daerah adalah hasil dari keberhasilan daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Menurut Rondonuwu dkk. (2015), APBD adalah proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang meliputi pendanaan pembangunan, memaksimalkan pendapatan daerah, dan memajukan pelayanan sosial bagi warganya. Sedangkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya sendiri untuk mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah dikenal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator keberhasilan keuangan daerah yang kuat adalah pengembangan potensi daerah secara efektif, ketergantungan yang lebih rendah pada

negara , dan penyaluran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih banyak dalam rangka mendanai pelaksanaan kegiatan daerah.

Informasi yang ada pada laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemda. Publik (pemegang saham) menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan. Berdasarkan teori keagenan menyatakan bahwa masyarakat, yang bertindak sebagai pemegang saham, memiliki kontrak dengan pemerintah yang menggunakan pemerintah sebagai agen untuk menyediakan layanan yang melayani kepentingan pemangku kepentingan (Mattoasi, 2021, p. 102). Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kinerja keuangan dengan melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk belanja selama kurun waktu satu tahun.

Implikasi dari hal tersebut maka diperlukan pihak independen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kepastian yang cukup karena prinsipal dan agen memiliki konflik kepentingan. Oleh karena itu Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai badan yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjaga tata kelola keuangan negara termasuk daerah. Sebagaimana yang tercantum tujuan BPK yakni berdasarkan renstra 2020-2024 yakni meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. BPK memilki peranan besar untuk menjaga agar penggunaan anggaran di daerah tersebut efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Bentuk kontribusi yang dilakukan oleh BPK dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yakni dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi melalui temuan dalam pemeriksaan serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Rekomendasi pemeriksaan BPK yang berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) seharusnya dapat membantu mengatasi kekurangan hasil pemeriksaan. Atas kelemahan yang diperbaiki sehingga secara langsung juga dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan manfaat pemeriksaan yakni peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dalam bentuk rekomendasi dan tindak lanjut yang efektif.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan yang dapat ditarik dari hasil temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil saran tindak lanjut yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Peneliti juga ingin mengetahui

bagaimana ukuran pemerintahan daerah mempengaruhi kinerja keuangannya. yang ditunjukkan dengan total asetnya. Menurut Sari (2019), semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahannya, maka akan semakin mudah pula pemerintah daerah tersebut menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahannya. Sebaliknya, apabila pemerintah daerahnya kecil, maka akan semakin sulit pula pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahannya. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya yang cukup agar dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diataa, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan pemda dipengaruhi oleh besar kecilnya satu pemerintah daerah?
2. Apakah kinerja keuangan pemda dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah temuan pada saat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan?
3. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah mendapat manfaat dari Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLRHP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka laporan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pengujian variabel Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2. Menjelaskan penngujian variabel Jumlah Temuan Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3. Menjelaskan pengujian variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka laporan ini bermanfaat bagi:

1. Program penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

Bagi Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara

a. Sebagai media mahasiswa menerarpkan ilmu yang sudah dipelajari dan dipahami di bangku perkuliahan terutama yang ingin mendalami sektor publik atau pemerintahan
b. Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

2. Bagi sektor Pemerintahan
   a. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya
   b. Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Asri, G. S. W. (2022). *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ganec Swara*, *18*(1), 41-50.

Kirana, A.S., Sulardi. 2020. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8 (2) : 175-192.

Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100 - 109.

Nugraheni, E., Adi, P.H.. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXI, Samarinda, 2018.

Rondonuwu, R H., Jantje J. T., & Budiarso N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3 (4), 23-32

Rahman, Z., Saputra, L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 22(2)*

Sularso, H dan Restianto Y E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1 (2), 109-124.

Sari, Ni Made Diah Permata, & Mustanda, I Ketut (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759, ISSN 2302-8912, Universitas Udayana,

Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7(1), 81-92.

Yamin, R., Mas' ud, M., & Sylvia, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Economics, Busines, Accounting & Society Review.*